

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang dihadapi Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kemiskinan pada dasarnya memiliki sifat multidimensi karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, standar hidup, pekerjaan, dan kondisi ekonomi rumah tangga (Artha & Misdawati, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak cukup dipahami hanya dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan, tetapi juga dari kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menunjang kehidupan yang layak.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Aceh masih berkaitan dengan berbagai persoalan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia. Penelitian Fitri Yanti (2023) menunjukkan bahwa pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di Aceh.

Sebagai salah satu kota di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe juga masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar pada sektor perdagangan, jasa, industri, dan usaha mikro, perkembangan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe selama periode 2007-2024 masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian dan kebijakan yang lebih efektif (Arsyad, 2017).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tingkat inflasi selama periode penelitian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perubahan tingkat inflasi menyebabkan perubahan harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat sementara pendapatan masyarakat relatif tetap, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, inflasi diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe (Sukirno, 2019).

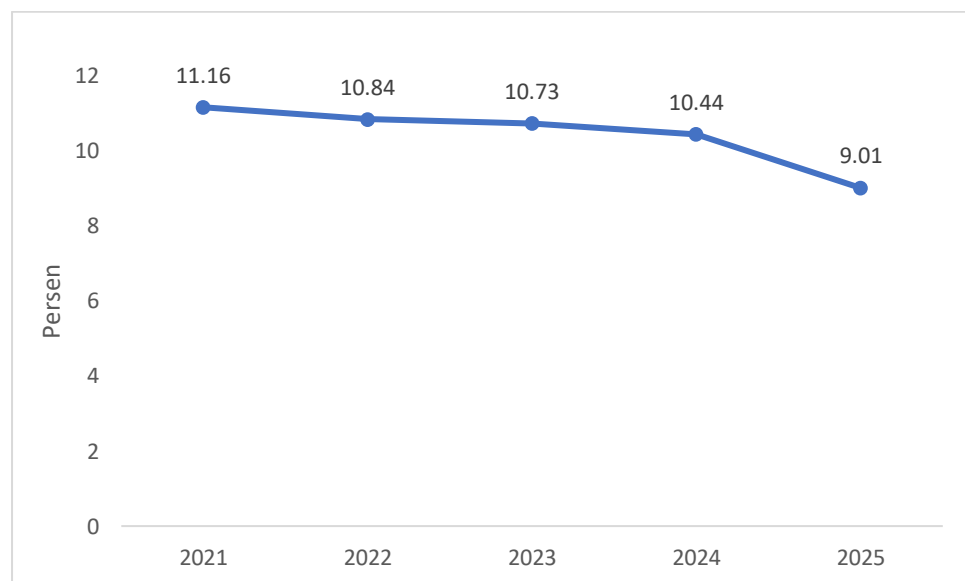
Berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Lhokseumawe selama periode 2007-2024, nilai IPM secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Kenaikan tersebut menggambarkan adanya perbaikan dalam pembangunan manusia, terutama dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, peningkatan IPM tidak selalu diikuti oleh penurunan

tingkat kemiskinan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum secara otomatis menghilangkan kemiskinan, sehingga hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian Batubara et al., (2023) di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe juga mengalami perubahan selama periode penelitian. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa masih terdapat angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi terbatas. Jika kondisi ini terus terjadi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menurun dan kemiskinan berpotensi meningkat. Hasil penelitian Batubara et al.,(2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu karena berfokus pada Kota Lhokseumawe sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini mengkaji pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah. Penelitian Ma'mun dan Fuadi (2023) sebelumnya juga mengkaji hubungan IPM, pengangguran, inflasi, dan kemiskinan, tetapi menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu lima kabupaten/kota di wilayah eks-Karesidenan Pati.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe (2025), perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe selama periode 2021-2025 menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun penurunannya tidak sama setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat penduduk yang berada dalam kondisi miskin. Penurunan kemiskinan juga perlu dilihat dari kondisi masing-masing daerah karena faktor yang memengaruhinya dapat berbeda antar wilayah. Penelitian Almismary (2024). menunjukkan bahwa kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh dipengaruhi oleh beberapa kondisi sosial dan ekonomi, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe 2021-2025

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada awal periode penelitian, tingkat kemiskinan berada pada angka 11,16 persen pada tahun 2021,

kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 9,01 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Lhokseumawe secara bertahap mengalami perbaikan setelah masa pandemi Covid-19.

Membaiknya kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perekonomian, pulihnya berbagai sektor usaha, serta bertambahnya kesempatan kerja yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan berbagai program pembangunan juga turut mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe Arsyad,(2017). Data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe (2025) juga menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat meskipun masih diperlukan upaya yang berkelanjutan agar angka kemiskinan dapat terus ditekan.

Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih perlu mendapat perhatian karena masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penurunan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pembangunan manusia dan keadaan pasar kerja. Mulyani et al. (2024) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 mengalami kecenderungan menurun, dari 11,16 persen pada tahun 2021 menjadi 9,01 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan di Kota Lhokseumawe dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh, tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe masih relatif lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh seperti Aceh Utara dan Aceh Timur, tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe relatif lebih rendah. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan setiap kabupaten dan kota di Aceh tidak sama, sehingga perkembangan dan kondisi masing-masing daerah perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Almismary et al., 2024).

Perkembangan tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Tingkat inflasi mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa tahun, yang menunjukkan adanya perubahan harga barang dan jasa di daerah tersebut. Dibandingkan dengan sasaran inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$, inflasi Kota Lhokseumawe pada beberapa tahun berada di atas kisaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan harga di Kota Lhokseumawe masih mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan perubahan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Penelitian Dewi dan Husein (2022) menunjukkan bahwa inflasi merupakan salah satu faktor yang turut dikaji dalam kaitannya dengan kondisi kemiskinan di wilayah Aceh.

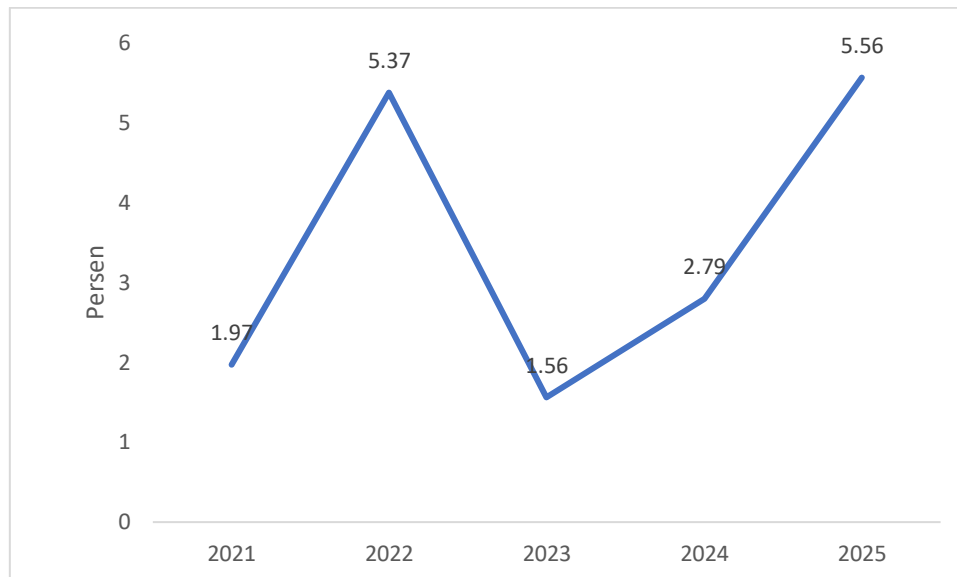
Inflasi merupakan salah satu kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli masyarakat

dapat menurun, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kenaikan harga tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin terbatas. Sebaliknya, inflasi yang dapat dikendalikan akan membantu menjaga daya beli masyarakat. Febriyanto (2025), menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan melalui pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, sehingga peningkatan inflasi dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Menurut Mankiw (2019), inflasi yang tinggi menyebabkan nilai riil pendapatan masyarakat menurun sehingga kemampuan konsumsi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, menjadi semakin terbatas. Hal tersebut juga didukung oleh Todaro dan Smith (2015) yang menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk tingkat kemiskinan karena mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus akan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kenaikan harga tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga risiko kemiskinan dapat meningkat. Oleh karena itu,

menjaga kestabilan harga menjadi salah satu hal penting dalam mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat (Apriandi & Silalahi, 2026).



Gambar 1.2 Inflasi Kota Lhokseumawe 2021-2025 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan inflasi di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat inflasi mengalami kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, seperti perubahan harga komoditas, kebijakan pemerintah, serta kondisi permintaan dan penawaran barang di pasar. Meskipun pada beberapa periode inflasi masih berada dalam kisaran yang terkendali, terdapat pula periode ketika inflasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Menurut Mankiw (2019), inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai riil pendapatan masyarakat sehingga kemampuan konsumsi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, menjadi semakin terbatas. Sejalan dengan itu, Boediono (2014) menyatakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-

menerus akan meningkatkan beban pengeluaran masyarakat sehingga kesejahteraan rumah tangga dapat menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan dengan baik, kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli karena pendapatan yang dimiliki harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat dapat mengurangi konsumsi dan semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nasir (2025) menunjukkan bahwa inflasi memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga pengendalian inflasi menjadi penting untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain inflasi, terdapat indikator lain yang juga diduga memengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, perkembangan IPM Kota Lhokseumawe perlu dianalisis untuk mengetahui kaitannya dengan tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

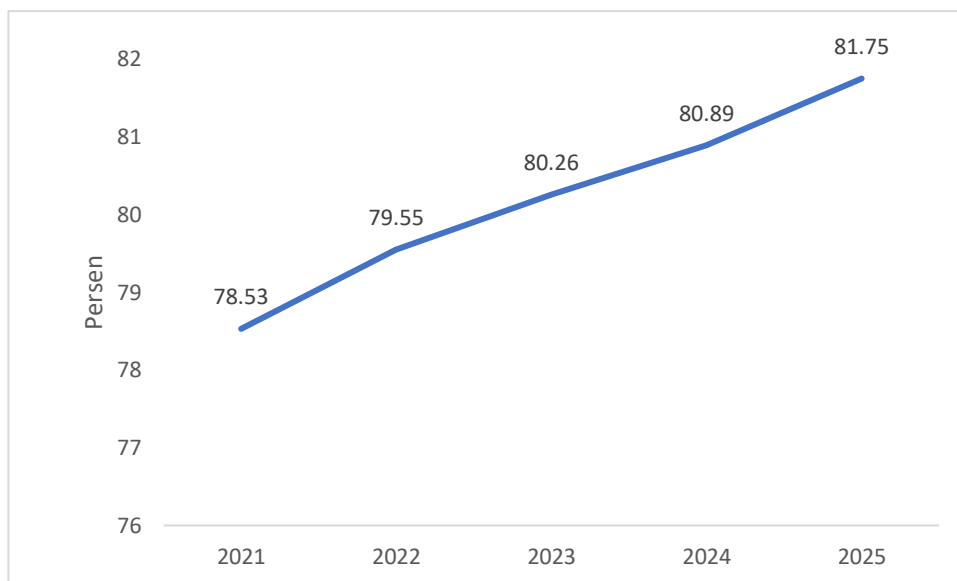
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM di Kota Lhokseumawe yang menunjukkan kecenderungan meningkat menggambarkan adanya perbaikan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik bagi

masyarakat dalam memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup. Dengan kondisi tersebut, peningkatan kualitas pembangunan manusia diharapkan dapat mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Wulandari & Prasasti, 2024).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang erat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Menurut Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker (1993), investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan masyarakat ikut meningkat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki peluang kerja yang lebih besar serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga risiko untuk berada di bawah garis kemiskinan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan IPM diharapkan mampu mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari 78,53 pada tahun 2021 menjadi 81,75 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe terus mengalami perbaikan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh, nilai IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mencapai 81,75, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Aceh sebesar 76,23. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh. Perkembangan IPM pada masing-masing tahun selama

periode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2021-2025 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2026*

Berdasarkan gambar 1.3, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari 78,53 pada tahun 2021 menjadi 81,75 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe semakin membaik, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2025, nilai IPM Kota Lhokseumawe juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 76,23, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata provinsi (BPS, 2026).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan perkembangan kualitas hidup masyarakat melalui beberapa aspek dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat

membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik juga semakin besar. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan mengurangi risiko kemiskinan. Aryanti dan Sukardi (2024) menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari 78,53 pada tahun 2021 menjadi 81,75 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe semakin baik melalui peningkatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2025, IPM Kota Lhokseumawe sebesar 81,75 lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh sebesar 76,23, yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata provinsi.

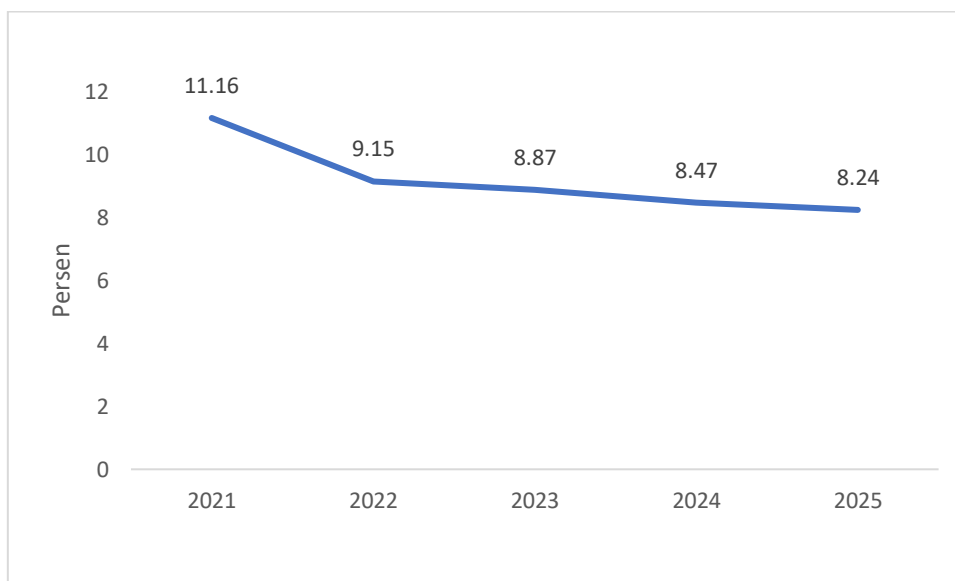
Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran mencerminkan kondisi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan meskipun telah memasuki pasar kerja.

Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kesempatan kerja yang tersedia

masih terbatas, masyarakat yang menganggur akan lebih sulit meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Penelitian Hayati et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada lima kota di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran dapat diikuti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Ketika sebagian angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang diterima masyarakat menjadi terbatas sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dapat menurun. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko masyarakat untuk berada dalam kondisi miskin, terutama apabila kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas. Penelitian Batubara, et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Perkembangan tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus menurun, yaitu dari 11,16% pada tahun 2021 menjadi 8,24% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja di Kota Lhokseumawe mulai membaik dan penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pada tahun 2025 tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 5,48%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kesempatan kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.



Gambar 1.4 Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe 2021-2025 (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, 2026

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 11,16% pada tahun 2021 menjadi 8,24% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja di Kota Lhokseumawe mulai mengalami perbaikan, meskipun tingkat pengangguran masih tergolong cukup tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketika kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja, sebagian masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, perluasan

kesempatan kerja menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Damayanti dan Fisabilillah (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik membuat penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kota Lhokseumawe.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terdidik terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, IPM, dan Tingkat pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe.
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terdidik terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe.
4. Mengetahui pengaruh inflasi, IPM, dan Tingkat pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kajian kemiskinan. Melalui analisis mengenai pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran terdidik terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis serta memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tingkat daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah terkait kajian kemiskinan, khususnya yang berfokus pada analisis tingkat daerah seperti Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kepada pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Melalui analisis pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran terdidik terhadap kemiskinan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti inflasi, kualitas sumber daya manusia, dan pengangguran terdidik. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya pendidikan, peningkatan keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi ekonomi.